

Implementation of the Tumbas Application as a Digital Ecosystem in Promoting the Growth of MSMEs in Mojokerto Regency

Implementasi Aplikasi Tumbas Sebagai Ekosistem Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mojokerto

Satya Arya Yuda¹⁾, Lailul Mursyidah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the implementation of the Tumbas application as a form of digital-based public service innovation initiated by the Mojokerto Regency Government to support the empowerment of local MSME actors. The purpose of this research is important because the implementation of public service applications involves not only the provision of technology but also how policies are effectively executed by implementing actors and accepted by the target community. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collection through in-depth interviews with policy implementers and MSME actors, field observations, and documentation related to policies and activities supporting the implementation of the application. Data analysis techniques refer to the data analysis model by Miles and Huberman, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings prove that the Tumbas application has successfully bridged MSME actors with the digital market in a more open and accessible manner, although those implementing it in the field still face challenges in terms of technological understanding, consistency in assistance, and coordination among agencies that has not been fully optimized. The research also found that the structure of bureaucracy and available human resources have begun to be directed more efficiently in supporting this digital service system. The novelty of this research lies in the implementation focus on the Tumbas application as a locally-based digital ecosystem that serves not only as a means of online transactions but also as a tool for regional economic development policy integrated with the principles of public policy implementation according to George C. Edwards III's theory. Thus, this research provides practical contributions to the enhancement of inclusive and adaptive regional-based digital public service innovations.*

Keywords - *Implementation of Policy, Tumbas Application, MSMEs, George C. Edwards III, Public Services.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Tumbas sebagai salah satu bentuk inovasi layanan publik berbasis digital yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Tujuan penelitian ini penting karena implementasi aplikasi layanan publik tidak hanya menyangkut penyediaan teknologi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif oleh aktor pelaksana dan diterima oleh masyarakat sasaran. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif, dengan beberapa tahap pengambilan data seperti wawancara terhadap pihak pelaksana kebijakan dan pelaku UMKM, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait kebijakan dan kegiatan yang mendukung implementasi aplikasi. Serta Teknik analisis data mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa aplikasi Tumbas telah berhasil menjembatani pelaku UMKM dengan pasar digital secara lebih terbuka dan mudah diakses, meskipun pelaksana di lapangan masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman teknologi, konsistensi pendampingan, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian juga menemukan bahwa struktur birokrasi dan sumber daya manusia yang tersedia telah mulai diarahkan secara lebih efisien dalam mendukung sistem layanan digital ini. Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada fokus implementasi terhadap aplikasi Tumbas sebagai ekosistem digital berbasis lokal yang tidak hanya berguna sebagai sarana transaksi daring, tetapi juga sebagai perangkat kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik menurut teori George C. Edwards III. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsi praktis bagi peningkatan inovasi pelayanan publik digital berbasis daerah yang inklusif dan adaptif.*

Kata Kunci - *Implementasi Kebijakan, Aplikasi Tumbas, UMKM, George C. Edwards III, Layanan Publik.*

I. PENDAHULUAN

Layanan publik adalah tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah. Ini termasuk pemerintah daerah yang berperan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan cara yang lebih optimal, sesuai dengan asas-asas *good governance*. Pemerintah memiliki peran vital dalam mengadakan layanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakatnya sejalan dengan yang tercantum di Undang-Undang, yakni pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 terkait pelayanan publik yang menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan tindakan atau serangkaian aktivitas untuk upaya pewujudan kepentingan pelayanan sejalan dengan peraturan perundang undangan oleh seluruh warga negara atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh pengelola pelayanan publik [1].

Seiring dengan pentingnya pelayanan publik dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mengelola dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Pelayanan publik tidak serta-merta berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan iklim yang mendukung bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan juga peningkatan ekonomi [2]. Penurunan peningkatan ekonomi Kabupaten Mojokerto dalam beberapa periode terakhir didorong oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, termasuk salah satunya pandemi COVID-19. Meskipun telah mengalami kejadian seperti itu, perekonomian Kabupaten Mojokerto secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan penguatan. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan ekonomi tersebut, berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	5,81
2020	-1,11
2021	4,12
2022	5,82
2023	5,15
2024	5,29

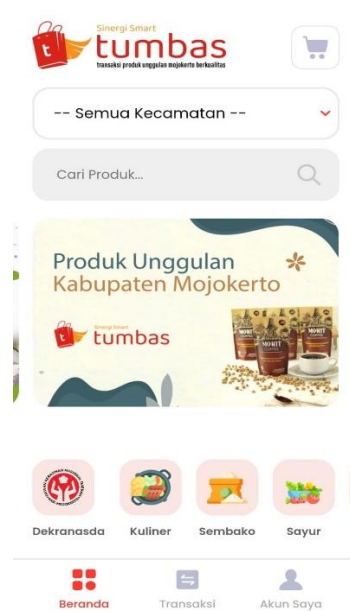
Sumber : Diolah oleh BPS Kabupaten Mojokerto

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto berhasil melalui masa krisis ekonomi dengan pemulihan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan drastis ditahun 2020 merupakan efek langsung dari pandemi COVID-19, sehingga menjadi titik balik yang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan angka pertumbuhan pada tahun-tahun selanjutnya, yang tidak hanya menandakan stabilitas tetapi juga mencerminkan responsivitas daerah terhadap tantangan yang dihadapi. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, serta UMKM yang turut andil terhadap pertumbuhan ini.

Sejalan dengan upaya tersebut, peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik pun mengalami perubahan, dari yang sebelumnya hanya sebagai pelaksana teknis kemudian menjadi pengarah, penggerak, dan fasilitator. Perubahan ini ditandai dengan orientasi yang semakin kuat terhadap partisipasi masyarakat dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan layanan administratif konvensional, tetapi juga dituntut untuk menciptakan inovasi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu bentuk nyata dari peran aktif ini adalah pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana mengacuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Terkait Inovasi Daerah yang menjelaskan bahwasanya inovasi daerah mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kinerja pada penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

Demi mencapai pelayanan publik yang baik, pemerintahan Kabupaten Mojokerto lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat suatu inovasi aplikasi pada tahun 2022 yang diperuntukkan untuk pemberdayaan UMKM di Kabupaten Mojokerto. Aplikasi ini diberi nama Tumbas, Tumbas (Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas) merupakan salah satu inovasi layanan publik yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor ekonomi dengan cara berjualan melalui aplikasi.

Gambar 1. Tampilan Aplikasi Tumbas



Sumber : Aplikasi Tumbas

Implementasi Aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto didukung oleh kerangka aturan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menetapkan pedoman bagi perangkat daerah dalam pengembangan dan pengelolaan layanan digital, termasuk Aplikasi Tumbas, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, “Pemerintah daerah ditujukan sebagai perantara dalam terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui cara peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan, output masyarakat, serta penguatan kualitas daya saing daerah. Aplikasi ini dilatar belakangi oleh adanya kesulitan pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran disaat kondisi wabah Covid-19 terjadi, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sebuah langkah pembuatan aplikasi ini supaya UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah kesulitan yang melanda. Aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) merupakan suatu media yang sudah berbasis teknologi, dengan diluncurkan aplikasi ini masyarakat akan lebih terbantu untuk berbelanja kebutuhan sehari hari tanpa harus datang ke pasar. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan platform bagi UMKM untuk menjual produk mereka secara online, tetapi juga sebagai alat promosi berbasis digital yang lebih optimal dalam memperkenalkan produk yang mereka jual. Dengan hadirnya aplikasi ini, diharapkan UMKM di Kabupaten Mojokerto dapat berkembang lebih pesat, menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kemampuan bersaing di era digital.

Adanya inovasi aplikasi ini menjawab adanya tantangan persaingan bisnis dalam kemajuan dunia teknologi informasi yang semakin pesat. Pada era perubahan digital yang semakin mendalam, penerapan teknologi informasi tidak lagi dianggap sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai kebutuhan strategis bagi para pelaku usaha. Perkembangan perangkat *mobile* dan fasilitas internet yang semakin merata mendorong inovasi dalam sistem transaksi digital. Aplikasi Tumbas muncul sebagai solusi untuk menyederhanakan interaksi antara penjual dan pembeli, menyediakan platform yang tidak hanya memudahkan jual beli, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengadaptasi teknologi baru serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen. Di sisi lain, tantangan seperti integrasi dengan sistem logistik, pelatihan sumber daya manusia, dan penyusunan kebijakan menjadi faktor serius yang harus diatasi untuk mencapai kinerja optimal. Faktor penerimaan pengguna dan adaptasi budaya digital turut memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi aplikasi Tumbas. Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih memilih kemudahan dan kecepatan transaksi digital menuntut pengembang aplikasi untuk terus berinovasi serta melakukan evaluasi berkelanjutan guna mengoptimalkan layanan[3].

Perkembangan ini dapat diamati melalui data mengenai pertumbuhan aplikasi Tumbas dari tahun ke tahun, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penjual dan pembeli meskipun masih menghadapi hambatan adaptasi, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut. Data ini bersumber dari dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto serta laporan hingga Oktober 2024, di mana total pengguna mencapai 4.500 orang dengan 5.570 produk terdaftar, mencerminkan kontribusi aplikasi terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Tabel 2. Peningkatan Jumlah Penjual Pada Aplikasi Tumbas per Tahun

Tahun	Periode	Jumlah Penjual	Target Realisasi (%)	Realisasi (%)	Jumlah Pembeli
2023	Januari - Juni	35	90	88	3.500
	Juli - Desember	50	95	92	4.500
2024	Januari - Juni	70	95	93	4.000
	Juli - Desember	100	98	95	11.400

Sumber : Laporan Dokumen Disperindag

Berdasarkan data diatas, pada periode Januari–Juni tahun 2023, jumlah penjual yang tergabung dalam aplikasi Tumbas tercatat sebanyak 35 pelaku UMKM dengan tingkat realisasi sebesar 88% dan Jumlah pembeli pada periode tersebut mencapai 3.500 pengguna. Selanjutnya, pada periode Juli–Desember tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penjual menjadi 50 pelaku UMKM, dengan realisasi sebesar 92% dan Peningkatan juga terlihat pada jumlah pembeli yang mencapai 4.500 pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun awal implementasi, aplikasi Tumbas mulai memperoleh respons positif dari masyarakat dan pelaku UMKM sebagai sarana pemasaran berbasis digital.

Pada tahun 2024, perkembangan implementasi aplikasi Tumbas menunjukkan tren yang meningkat. Periode Januari–Juni tahun 2024 mencatat jumlah penjual sebanyak 70 pelaku UMKM dengan realisasi sebesar 93%. Meskipun demikian, jumlah pembeli mengalami sedikit penurunan menjadi 4.000 pengguna dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut dapat didasari oleh beberapa unsur, yakni perubahan pola konsumsi masyarakat, tingkat persaingan dengan platform digital lain, maupun belum optimalnya intensitas promosi aplikasi pada periode tertentu. Namun, pada periode Juli–Desember tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana jumlah penjual mencapai 100 pelaku UMKM dengan realisasi sebesar 95%. Selain itu, jumlah pembeli meningkat drastis hingga mencapai 11.400 pengguna. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aplikasi Tumbas mulai mengalami penguatan fungsi sebagai media transaksi digital bagi UMKM di Kabupaten Mojokerto.

Adanya perbedaan capaian pada setiap periode dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Tumbas didasari oleh berbagai unsur baik internal ataupun eksternal. Salah satu unsur utama ialah proses adaptasi teknologi oleh pelaku UMKM dan masyarakat. Pada tahap awal implementasi, sebagian pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama dalam pengoperasian aplikasi, pengelolaan produk, dan proses transaksi daring. Kondisi ini menyebabkan tingkat penggunaan aplikasi belum dapat berjalan secara optimal pada fase awal pelaksanaan program.

Selain itu, perbedaan perkembangan pada setiap periode juga dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melewati Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Seiring meningkatnya kegiatan pelatihan, edukasi digital, dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Tumbas juga mengalami peningkatan. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penjual maupun pembeli pada periode berikutnya. Di sisi lain, dukungan infrastruktur digital, kerja sama antarinstansi, serta peningkatan kualitas layanan aplikasi turut berkontribusi terhadap pertumbuhan penggunaan aplikasi Tumbas secara bertahap.

Aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa inovasi digital ini telah memberikan kesempatan baru bagi aktor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperbesar jangkauan pasar mereka. Namun, di balik kemudahan tersebut, para penjual juga menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup nyata di lapangan. Masalah pertama, yang paling sering dirasakan oleh penjual adalah rendahnya literasi digital dan keterbatasan kemampuan dalam mengelola toko daring. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berusia lebih tua, masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur aplikasi seperti mengunggah foto produk, memperbarui stok, serta menanggapi pesanan konsumen secara cepat. Kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah membuat sebagian penjual belum mampu memaksimalkan potensi digitalisasi yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Masalah berikutnya adalah keterbatasan fitur dalam aplikasi Tumbas itu sendiri. Pada versi yang ada saat ini, penjual belum dapat menampilkan jumlah stok secara otomatis maupun menerima ulasan langsung dari pembeli. Kondisi ini membuat interaksi antara penjual dan pembeli menjadi terbatas dan berdampak pada kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi. Selain itu, sistem pembayaran dan logistik juga masih perlu diperkuat agar proses transaksi dapat berjalan lebih efisien. Selain faktor teknis, masalah berikutnya adalah kurangnya sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Sosialisasi mengenai manfaat, cara penggunaan, serta pengelolaan toko digital masih belum menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto. Akibatnya, sebagian penjual belum memahami potensi ekonomi yang bisa diperoleh melalui platform digital ini. Walaupun demikian, sebagian besar penjual mengakui bahwa keberadaan aplikasi Tumbas merupakan langkah maju dalam mendukung transformasi digital UMKM daerah. Dengan peningkatan pelatihan, penyempurnaan fitur, serta dukungan logistik yang lebih kuat, aplikasi ini berpotensi menjadi ekosistem digital yang efektif dalam memperkuat

daya saing UMKM di Mojokerto.

Implementasi kebijakan publik bukanlah proses yang sederhana, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya. Dalam hal ini, George C. Edwards III menjelaskan bahwasanya kesuksesan penerapan kebijakan sangat berkaitan pada empat indikator penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Indikator ini terhubung satu sama lain dan membentuk suatu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami efektivitas penerapan kebijakan di lapangan. Komunikasi, Komunikasi menjadi kunci utama dalam proses implementasi. komunikasi kebijakan harus disampaikan melalui cara yang efektif kepada para pegawai pelaksana[4]. Jika para penyelenggara kebijakan tidak memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat dijalankan secara baik. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan kesalahan penyampaian pesan, atau bahkan hambatan dari pihak pelaksana. Oleh sebab itu, kejelasan, konsistensi, dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan kebijakan merupakan aspek yang sangat penting. Sumber Daya, Sumber daya juga memegang fungsi krusial dalam implementasi kebijakan. Beragamnya sumber daya dan keterlibatan semua pihak semangkin diperhitungkan sebagai faktor penentu dalam menentukan kinerja dan keberhasilan suatu kebijakan[5]. walaupun suatu kebijakan telah disampaikan dengan baik, namun apabila tidak adanya dukungan sumber daya yang mencukupi, kebijakan ini tetap akan mengalami hambatan. Sumber daya ini mencakup pegawai yang kompeten, pendanaan yang cukup, serta fasilitas yang mendukung.

Disposisi, Disposisi atau sikap dari para penyelenggara kebijakan menunjukkan sejauh mana mereka menerima dan mendukung kebijakan tersebut. Hasil dari indikator disposisi merupakan sebagai potensi dari aspek administrasi manajemen implementasi[6]. Jika para pelaksana memiliki sikap positif dan merasa bahwa kebijakan tersebut layak dan penting untuk dijalankan, maka mereka akan bekerja dengan lebih maksimal. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat, bahkan mungkin mengalami kegagalan. Struktur birokrasi, Struktur birokrasi sebagai faktor terakhir dalam teori Edwards III mencerminkan bagaimana kebijakan diatur dan dilaksanakan dalam struktur pemerintahan. Penerapan prosedur menjadi tidak berjalan baik apabila struktur birokrasi tidak sejalan terhadap alurnya penerapan kebijakan tersebut[7]. Birokrasi yang terlalu kaku seringkali menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan struktur birokrasi yang fleksibel namun tetap memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) juga sistem distribusi beban kerja yang nyata dan efisien.

Dalam pembuatan artikel ilmiah ini, penelitian sebelumnya cukup berharga sebagai acuan atau pedoman dalam studi ini. Penelitian pertama yang dilakukan pada tahun 2025 dengan judul “Penerapan Framework PIECES Untuk Analisis Kinerja Aplikasi Tumbas”, berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Tumbas dinyatakan mampu menyajikan informasi yang lengkap dan relevan bagi pengguna, termasuk detail produk, notifikasi transaksi, dan pembaruan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini memastikan pengguna mendapat data yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian yang informasional dan efektif, meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Meskipun aplikasi Tumbas memberikan banyak manfaat, namun pada hasil penelitian ini menunjukkan aspek keamanan data pengguna menjadi perhatian utama. Tantangan ini mencakup perlunya peningkatan rangkaian keamanan untuk menjaga data privasi pengguna dari penyalahgunaan atau kemungkinan kejahatan *cyber*. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan pelanggan, yang merupakan kunci untuk keberlangsungan dan pertumbuhan aplikasi[8]. Selanjutnya penelitian pada tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Aplikasi E-Market Program Penjualan Dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Grafik Penjualan Per Bulan Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin”, berdasarkan penelitian tersebut bahwa artikel ini secara khusus membahas kondisi UMKM di Kota Banjarmasin, memberikan konteks lokal yang mungkin tidak ada pada artikel lain yang bersifat lebih umum atau regional. Hal ini meliputi data spesifik mengenai jumlah pelaku UMKM terdaftar dan tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut. Penerapan aplikasi e-market berbasis website menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu UMKM dalam memperluas pangsa pasar mereka. Dengan memanfaatkan internet sebagai platform pemasaran, penelitian ini menyoroti potensi digitalisasi dalam mengoptimalkan keunggulan usaha kecil dan menengah dimasa modern. Pada aplikasi e-market ini penggunaan model waterfall dalam pengembangan sistem memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk menciptakan aplikasi. Ini menunjukkan praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak yang relevan dalam konteks UMKM[9].

Penelitian selanjutnya ialah dengan judul “Inovasi Aplikasi E-Peken : Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya” pada tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini bertujuan untuk membantu memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM, yang sebelumnya terbatas pada lingkup domisili pelaku UMKM, sehingga menawarkan peluang yang lebih luas untuk pemasaran produk unggulan. Penelitian mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk tidak adanya fitur pembatalan pesanan yang memadai dan masalah pada server aplikasi yang menyebabkan eror, yang mengganggu pengalaman pengguna. Kebijakan yang berkaitan dengan dorongan ASN untuk berbelanja melalui aplikasi E-Peken belum didukung dengan peraturan tertulis yang jelas, sehingga perlu ada kejelasan hukum dan administrasi untuk memperkuat penerapan kebijakan tersebut[10]. Penelitian selanjutnya ialah dengan judul “E-Marketplace Media Pengembangan Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi Umkm Kota Pekanbaru” pada tahun 2020, berdasarkan penelitian ini hasil analisis menggunakan metode User Acceptance Test (UAT) mengindikasikan bahwa tingkat penerimaan pengguna dari kalangan pelaku usaha rata-rata

adalah 88,4%, sedangkan dari kalangan masyarakat adalah 82,6%. Ini memperlihatkan bahwa sistem masih bisa diterima dengan baik oleh pengguna. Penelitian juga melakukan pengkajian dana dan kegunaan melalui metode *Payback Period* dan *Return on Investment (ROI)*, yang menunjukkan bahwa perkembangan sistem e-Marketplace ini layak untuk dioptimalkan. Sistem ini mampu membantu dinas dalam mengurus data UMKM dan memudahkan pelaku usaha dalam mempromosikan produk mereka[11]. Penelitian lainnya dengan judul “Pengembangan Aplikasi Marketplace Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Berbasis Android” pada tahun 2021, Hasil dari riset ini adalah peningkatan suatu aplikasi perangkat lunak marketplace yang ditujukan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk membuat akun, menambahkan produk, dan mengelola penjualan mereka dengan mudah, langsung tanpa melalui perantara. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan penjualan produk mereka. Meskipun fungsionalitas dasar telah tersedia, fitur yang ada masih terbatas. Misalnya, tidak terdapat fitur ruang obrolan yang dapat meningkatkan interaksi antara pelaku UMKM dan konsumen. Penambahan fitur komunikasi dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna[12].

Berlandaskan refrensi pada penelitian terdahulu diatas, Keterbaruan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu terdapat pada inti kajian yang tidak hanya membahas aplikasi digital UMKM sebagai media pemasaran atau transaksi daring, tetapi juga menempatkan aplikasi Tumbas sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik dan ekosistem digital daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses implementasi aplikasi Tumbas dijalankan oleh pemerintah daerah dengan memakai pendekatan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang memuat unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jika dikaitkan dengan persoalan yang telah dijelaskan, maka dari itu tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan menggambarkan terkait Implementasi Aplikasi Tumbas Sebagai Ekosistem Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kabupaten Mojokerto berasas pada teori implementasi berdasarkan George C. Edward III.

II. METODE

Pada penelitian terkait “Implementasi Aplikasi Tumbas Sebagai Ekosistem Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kabupaten Mojokerto”, Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan guna menegetahui kejadian perihal apa yang terjadi oleh pokok penelitian dengan secara menyeluruh dengan upaya menjelaskan dalam wujud bahasa dan kata-kata. Melalui penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif, peneliti berupaya untuk memahami serta menjelaskan dengan rinci dan mendalam tentang pelaksanaan Aplikasi Tumbas Sebagai Ekosistem Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kabupaten Mojokerto.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada riset ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai dalam mengakumulasi materi yang dipakai pada sebuah riset. Teknik penentuan informan pada riset ini memakai *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti menentukan informan secara terencana berlandaskan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan maksud penelitian ini. Dalam hal ini, informan yang dipilih dipandang mempunyai pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Aplikasi Tumbas. Sumber data pada penelitian ini didapat dari data primer dimana periset melaksanakan wawancara secara tatap muka dengan beberapa informan yaitu Ibu Iis Fitrianiingsih selaku pejabat fungsional analisis perdagangan ahli muda sekaligus yang menangani Aplikasi Tumbas, kemudian informan berikutnya berjumlah dua orang yang merupakan pelaku UMKM yang terlibat di Aplikasi Tumbas ini, atas nama Bu Yeni yang berjualan jamu dengan nama toko Binar Store yang berlokasi di Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari dan informan berikutnya atas nama Mas Adi yang berjualan sepatu dengan nama toko Fourf yang berlokasi di Desa Menanggal Kecamatan Mojosari. Untuk memenuhi hasil penelitian ini, juga memakai data sekunder dari arsip yang ada. Teknik analisis data pada penelitian ini memakai model kajian data menurut Miles dan Huberman yang memuat beberapa fase, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditahap pengumpulan data, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait implementasi aplikasi Tumbas. Selanjutnya, informasi yang telah didapat direduksi melalui cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang sesuai tujuan penelitian ini. Setelah itu, data ditampilkan dalam format penjabaran deskriptif supaya meringankan peneliti untuk mengetahui kaitan tiap data. Fase terakhir yaitu penarikan kesimpulan dikerjakan dengan memadukan hasil temuan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi aplikasi Tumbas sebagai ekosistem digital dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mojokerto. Fokus dalam penelitian ini ialah menganalisis dan mendeskripsikan terkait Implementasi Aplikasi Tumbas Sebagai Ekosistem Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Di Kabupaten Mojokerto, sedangkan teori yang dipakai pada penelitian ini ialah teori implementasi menurut George C. Edward III yang berisi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori implementasi berdasarkan George C. Edward III didapati empat unsur yang berdampak pada kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokras. Teori ini digunakan peneliti karena indikator-indikator yang dipresentasikan oleh George C. Edward III ini diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam.

Komunikasi

Pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, komunikasi memiliki posisi vital dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat disampaikan dengan tepat ke dalam tindakan pelaksana di lapangan. Edwards III menekankan bahwa komunikasi bukanlah sekadar proses pengiriman pesan secara mekanis, melainkan suatu yang mendasari pemahaman bersama antara pembuat kebijakan dan para pelaksana. Dengan komunikasi yang efektif, informasi mengenai tujuan, sasaran, dan langkah-langkah kebijakan disampaikan secara menyeluruh kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat memahami dengan tepat apa yang harus dilakukan.

Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat memberikan umpan balik dari lapangan, sehingga informasi mengenai tantangan dan kondisi yang sebenarnya dapat segera dipahami dan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, proses komunikasi tidak hanya menyampaikan instruksi, tetapi juga memfasilitasi terhadap situasi di lapangan. Melalui komunikasi yang terstruktur, visi strategis yang terkandung dalam kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara efektif dan efisien.

Sesuai hasil wawancara dengan pihak Disperindag terkait aplikasi Tumbas, komunikasi memerankan peran yang sangat penting dalam setiap tahap implementasi aplikasi ini, mulai dari perencanaan hingga operasional sehari-hari. Didapatkan bahwa pada saat memperkenalkan aplikasi Tumbas terdapat tantangan yang berarti dalam proses sosialisasi. Hal ini karena peluncuran aplikasi bertepatan dengan pandemi Covid-19. Sehingga keterbatasan anggaran dan situasi pandemi Covid-19 menyebabkan proses sosialisasi antara pemerintah dan pelaku UMKM tidak berlangsung secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Ibu Iis selaku pejabat fungsional yang menangani Aplikasi Tumbas menyatakan bahwa:

“Dari Disperindag sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi, tapi memang belum bisa maksimal karena terbatasnya anggaran dan waktu. Apalagi saat itu juga masih dalam masa pandemi.” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Komunikasi yang terbatas pada saat awal diperkenalkannya aplikasi ini juga menyebabkan informasi mengenai keberadaan dan manfaat aplikasi Tumbas tidak tersebar merata di kalangan pelaku UMKM ataupun masyarakat umum. Akibatnya, sebagian besar UMKM di Mojokerto belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap tujuan dan fungsi aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Bu Iis bahwa:

“Banyak pelaku UMKM yang belum terlalu ngerti cara pakai aplikasi Tumbas, soalnya mereka belum terbiasa pakai teknologi.” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Pernyataan Ibu Iis dikuatkan dengan keterangan yang dijelaskan oleh salah satu Ibu Yeni yang menyatakan sebagai berikut:

“Waktu pertama kali dengar tentang Aplikasi Tumbas, saya belum langsung ngerti fungsinya buat apa. Menurut saya, sosialisasinya masih kurang jelas dan belum nyentuh semua pelaku UMKM, apalagi yang belum terbiasa pakai teknologi. Banyak yang masih bingung cara akses dan pakainya, jadi sebenarnya kami lebih butuh pendampingan langsung, bukan cuma info lewat selebaran atau rapat sebentar.” (wawancara tanggal 27 maret 2025).

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Tumbas



Sumber : Dokumentasi Disperindag

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu, pelaksanaan sosialisasi aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya memperluas jangkauan informasi bukan hanya kepada pelaku UMKM tetapi

juga kepada ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan melalui berbagai media, termasuk pertemuan tatap muka, penyuluhan kelompok, dan pemanfaatan platform digital. Hal ini diungkapkan oleh ibu Yeni salah satu pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi ini,

“Kalau dibandingin pas awal-awal rilis, sekarang sosialisasi Aplikasi Tumbas udah jauh lebih oke. Kita jadi lebih sering dapet info dari dinas, baik lewat pertemuan langsung atau dari media sosial. Udah ada juga pelatihan singkat yang bikin kita lebih ngerti cara pakainya. Memang belum semua UMKM ikut, tapi lumayan udah ada perubahan yang bagus.” (wawancara tanggal 27 maret 2025).

Dari hasil pemaparan tersebut dapat diperoleh bahwa komunikasi dalam sosialisasi aplikasi Tumbas berperan penting dalam menghubungkan kebijakan digital pemerintah daerah dengan pelaku UMKM sebagai sasaran utama. Upaya sosialisasi yang dijalankan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya peningkatan dalam hal penyampaian informasi, kejelasan pesan, serta penggunaan media yang lebih beragam. Hal ini sejalan dengan pandangan George C. Edwards III yang menempatkan komunikasi dalam unsur penentu kesuksesan penerapan kebijakan. Meski belum sepenuhnya merata, proses sosialisasi telah membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk lebih memahami dan mulai mengadopsi aplikasi sebagai bagian dari strategi pemasaran.

Selain melalui kegiatan sosialisasi secara langsung, proses komunikasi dalam implementasi aplikasi Tumbas juga dilakukan melalui pemanfaatan media digital dan koordinasi antarlembaga. Penyampaian informasi yang dilakukan secara bertahap menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi UMKM sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis teknologi. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi yang berjalan secara berkelanjutan mampu membantu pelaku UMKM memahami tujuan program, tata cara penggunaan aplikasi, serta manfaat yang dapat diperoleh melalui sistem transaksi digital. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif, pelaku usaha secara perlahan mulai menyesuaikan diri terhadap perubahan pola pemasaran dari konvensional menuju digital. Dengan demikian, komunikasi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait perbedaan tingkat pemahaman teknologi di kalangan pelaku UMKM. Tidak seluruh pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama dalam menerima dan memahami informasi terkait penggunaan aplikasi Tumbas. Kondisi ini menyebabkan proses penyampaian kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya dipahami sebagai penyajian informasi semata, melainkan juga seperti upaya menciptakan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat agar implementasi aplikasi dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi UMKM Melalui Aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok”, yang menunjukkan bahwa komunikasi menjadi unsur yang vital dalam mendukung kesuksesan penerapan kebijakan digitalisasi UMKM. Pada penelitian terdahulu, proses komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan aplikasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada cara komunikasi berasas teori implementasi George C. Edwards III yang memuat kejelasan informasi, konsistensi penyampaian pesan, serta hambatan komunikasi akibat rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Dengan demikian, komunikasi dalam implementasi aplikasi Tumbas bukan hanya berperan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media pembangunan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital [13].

Sumber Daya

Pada teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh George C. Edwards III, sumber daya adalah salah satu elemen dasar yang memberikan dampak kesuksesan penerapan kebijakan. Sumber daya dalam konteks ini bukan hanya mencakup jumlah personel yang tersedia, akan tetapi juga kualitas dan kompetensi mereka, serta kecukupan anggaran, fasilitas, dan sumber informasi yang mendukung. Menurut Edwards III, walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara efektif, tanpa dorongan sumber daya yang mencukupi, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Ketersediaan staf yang kompeten memungkinkan para pelaksana untuk menerjemahkan instruksi dan strategi kebijakan ke dalam tindakan operasional yang tepat. Dengan kata lain, sumber daya berfungsi sebagai landasan yang memberi sarana bagi kebijakan untuk diimplementasikan secara efektif supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil. Tanpa sinergi antara komunikasi yang jelas dan ketersediaan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan rentan terhadap hambatan dan penyimpangan dari tujuan awal.

Berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa keberadaan dan tingkat sumber daya manusia adalah unsur vital yang mendorong keberlangsungan kegiatan aplikasi Tumbas di Mojokerto. Implementasi kebijakan bukan hanya mengandalkan pada struktur atau kebijakan tertulis, melainkan sangat didasari oleh kapasitas dan keterlibatan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga pelaksana di lapangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menunjukkan upaya aktif dalam memastikan bahwa tenaga teknis yang menangani aplikasi memiliki kompetensi yang memadai. Melalui kerja sama dengan pihak lain sebagai penyedia layanan sistem, pemerintah menyediakan dukungan teknis yang secara rutin melakukan pemeliharaan dan pembaruan terhadap aplikasi, serta siap merespons jika terjadi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sekaligus yang menangani Aplikasi Tumbas yakni Ibu Iis dengan menyampaikan bahwa,

“Kita kerja sama sama pihak ketiga yang selalu standby, jadi kalau ada masalah bisa langsung dikomunikasikan dan cepat ditangani.” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Selain itu, fungsi sumber daya manusia bukan hanya sebatas pada segi teknis, akan tetapi juga meliputi kegiatan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM sebagai pengguna utama aplikasi. Seorang pelaku UMKM yang bernama Mas Adi ketika diwawancarai menyampaikan,

“Sekarang udah lebih ngerti, soalnya ada yang datang langsung dan bantuin ngajarin. Dulu sempat bingung cara makenya, tapi setelah diajarin langsung, jadi lebih paham. Sekarang malah udah bisa masukin produk sendiri.” (wawancara tanggal 27 maret 2025).

Hal ini memperkuat temuan bahwa kehadiran sumber daya manusia yang kompeten dan responsif sangat dibutuhkan dalam meningkatkan literasi digital serta kepercayaan pelaku usaha terhadap aplikasi. Dengan demikian, operasional Tumbas bukan hanya mengandalkan pada sistem digital itu sendiri, melainkan juga pada dukungan sumber daya manusia yang memastikan aplikasi dapat diakses, digunakan, dan dipahami dengan baik oleh para penggunanya. Hal ini membuktikan bahwa SDM merupakan aspek penting dalam menghubungkan kebijakan digital dengan praktik nyata di lapangan.

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi aplikasi Tumbas tidak hanya mencakup aspek sumber daya manusia, tetapi juga meliputi dukungan fasilitas, jaringan teknologi, dan sistem operasional yang mendukung keberlangsungan aplikasi. Dukungan teknis dari pihak ketiga sebagai pengelola sistem menunjukkan bahwa implementasi aplikasi digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak yang memiliki kemampuan teknis dalam pengembangan teknologi informasi. Keberadaan fasilitas pendukung seperti jaringan internet, sistem pemeliharaan aplikasi, serta layanan operasional menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas penggunaan aplikasi Tumbas oleh masyarakat dan pelaku UMKM.

Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi TUMBAS dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi UMKM. Akan tetapi, penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan, terutama melalui pendampingan teknis, pelatihan penggunaan aplikasi, serta dukungan pihak ketiga dalam pengelolaan sistem aplikasi Tumbas. Oleh karena itu, sumber daya dalam implementasi aplikasi Tumbas tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan fasilitas dan anggaran, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem digital secara berkelanjutan.

Disposisi

Pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan ialah sebagian dari empat unsur pokok yang mendorong efektivitas implementasi kebijakan, selain komunikasi dan sumber daya. Disposisi mengacu pada kecenderungan, komitmen, dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Apabila para penyelenggara mempunyai tindakan yang jelas dan mendukung terhadap kebijakan tersebut, pelaksana cenderung melakukan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksetujuan dari para pelaksana, hal ini dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal kebijakan.

Dalam proses implementasi aplikasi Tumbas oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, disposisi pelaksana kebijakan memainkan peranan penting dalam menentukan sejauh mana program ini dapat diterima dan digunakan secara efektif oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Iis selaku pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, tampak bahwa para pelaksana telah menunjukkan komitmen terhadap kebijakan ini.

“Kami juga turun langsung ke lapangan, ikut sosialisasi, dampingi para UMKM, dan pastiin aplikasi Tumbas ini benar-benar dipakai.” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki sikap yang proaktif dalam mendekati kebijakan digital kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi sasaran program Tumbas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kesiapan dan semangat pelaksana ini masih menghadapi tantangan dalam hal persepsi dan pemahaman di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Mas Adi selaku UMKM yang memakai Aplikasi Tumbas bahwa,

“Saya pernah diajak ikut sosialisasi soal aplikasi Tumbas, tapi jujur aja masih bingung cara pakainya. Soalnya belum terbiasa pakai aplikasi kayak gitu, jadi butuh waktu buat benar-benar ngerti.” (wawancara tanggal 27 maret 2025).

Pernyataan ini mencerminkan bahwa meskipun pelaksana menunjukkan itikad baik dan telah mengimplementasikan sosialisasi, keberhasilan disposisi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, tingkat pemahaman digital masyarakat, dan kesinambungan pendampingan. Disposisi yang kuat seharusnya tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi formal, tetapi harus dilanjutkan dengan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian strategi implementasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi aplikasi Tumbas menunjukkan adanya dukungan dan tanggung jawab dari pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Sikap proaktif

yang ditunjukkan oleh pelaksana melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan lapangan menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui keterlibatan langsung kepada masyarakat sasaran. Hal ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan sangat didasari bagaimana pelaksana mempunyai kesadaran dan keinginan dalam menjalankan program sesuai tujuan awal yang telah ditetapkan.

Namun demikian, disposisi yang baik dari pelaksana tetap perlu didukung oleh peningkatan respons dan partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian pelaku usaha yang memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan penggunaan aplikasi digital karena keterbatasan pengalaman dan pemahaman teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital membutuhkan proses penyesuaian yang berlangsung secara bertahap. Oleh sebab itu, diperlukan konsistensi sikap dan komitmen pelaksana dalam memberikan pendampingan secara berkelanjutan agar tujuan pengembangan aplikasi Tumbas dapat tercapai secara optimal.

Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya dukungan positif dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun dari aktor UMKM terhadap penerapan aplikasi TUMBAS sebagai sarana digitalisasi pemasaran produk lokal. Sikap positif tersebut terlihat dari adanya komitmen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan program digitalisasi UMKM melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pengembangan layanan aplikasi. Meskipun demikian, penelitian ini lebih menekankan disposisi berlandaskan teori George C. Edwards III, yaitu mengenai sikap, komitmen, dan kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi aplikasi Tumbas. Dengan adanya disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan maupun pelaku UMKM, implementasi aplikasi Tumbas dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis digital di Kabupaten Mojokerto.

Struktur Birokrasi

Pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi memegang peran sentral sebagai kerangka yang mendukung seluruh proses pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi tidak hanya mengacu pada adanya aturan tertulis dan prosedur standar (SOP), tetapi juga mencakup sistem hierarki, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi antar unit dalam organisasi. Edwards III berpendapat bahwasanya kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan sangat mengandalkan pada sejauh mana struktur organisasi mampu menyampaikan perintah secara sistematis ke seluruh lapisan pelaksana, sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas. Struktur birokrasi yang efektif harus dapat mengatasi hambatan yang muncul akibat kerumitan struktur organisasi dan pembagian tugas yang tidak jelas. Dalam hal ini, SOP yang dirancang tidak hanya memastikan konsistensi, tetapi juga memberikan kebebasan agar para pelaksana dapat menyesuaikan diri dengan dinamika situasi di lapangan. Sistem kerja yang baik dalam struktur birokrasi akan membantu menghubungkan berbagai unit kerja sehingga terjadi kesamaan dalam pelaksanaan kebijakan, sekaligus mengurangi terjadinya tumpang tindih tugas dan konflik internal.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa birokrasi yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi Tumbas telah memiliki pembagian kerja yang relatif terstruktur, mulai dari tim pengembang aplikasi, admin pengelola, hingga operator yang menangani proses unggah data dan permintaan pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ibu Iis,

“Operator kami ada yang mengatur data produk, dan ada yang mendata UMKM yang aktif. Semuanya sudah kami petakan tugasnya.” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Ini menunjukkan adanya pembagian peran internal yang spesifik dalam operasionalisasi sistem, yang mencerminkan prinsip dasar struktur birokrasi yang tertib. Pembagian tugas pada implementasi aplikasi Tumbas melibatkan berbagai pihak, seperti Diskominfo, Disperindag, mitra IT, UMKM, kurir Tumbas Express, serta masyarakat pengguna aplikasi. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Iis,

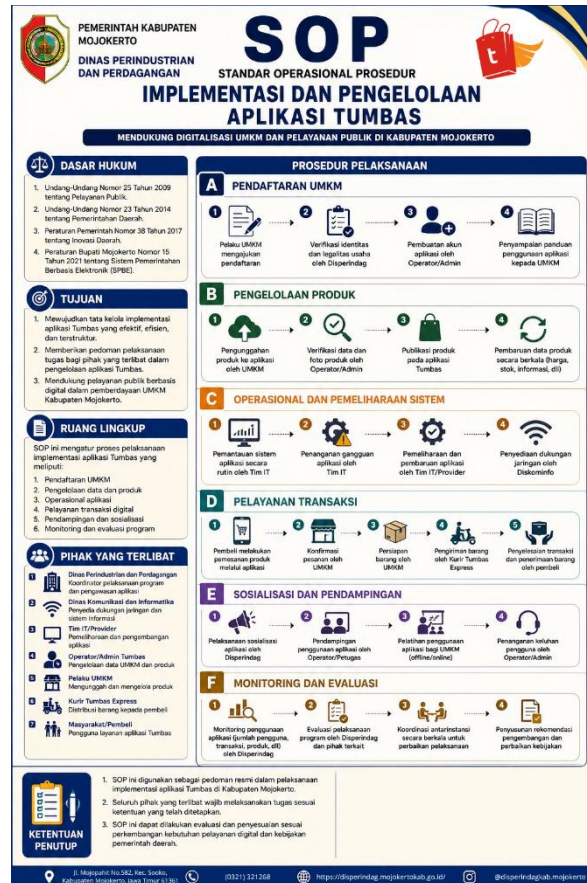
“Iya, Pelaksanaan Aplikasi Tumbas tentu melibatkan pihak lain untuk optimalisasi sistem. Pihak-pihak tersebut diantaranya Kominfo sebagai penyedia jaringan, pihak ketiga (IT) yang bekerja sama dengan Disperindag sebagai provider (Pemelihara Aplikasi Tumbas), para UMKM sebagai penjual (Tumbas seller), dan para kurir sebagai pengantar barang (Tumbas express). Dan juga untuk lebih jelas terkait pembagian sistem kerja, pada bagian IT kita menggunakan Surat Perintah Kerja, dengan diskominfo Disperindag mematuhi SOP yang diterbitkan oleh Diskominfo, dengan JNE sudah mengadakan MOU dengan Pemkab Mojokerto. Selebihnya komunikasi pasif yang diadakan dengan rapat atau komunikasi verbal melalui telepon., dengan Tumbas Express kita menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPK).” (wawancara tanggal 25 maret 2025).

Implementasi Aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto didukung oleh kerangka aturan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini menetapkan pedoman bagi perangkat daerah dalam pengembangan dan pengelolaan layanan digital, termasuk Aplikasi Tumbas, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi operasional Aplikasi Tumbas, efektivitas implementasinya bergantung pada koordinasi antarlembaga dan kesiapan infrastruktur. Tantangan seperti integrasi sistem, pelatihan sumber daya manusia, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan aplikasi ini dalam mendukung UMKM lokal.

Struktur birokrasi dalam implementasi aplikasi Tumbas menunjukkan adanya pembagian tugas dan koordinasi

antarinstansi yang bertujuan mendukung efektivitas pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai pihak seperti Disperindag, Diskominfo, penyedia layanan teknologi, kurir, serta pelaku UMKM mencerminkan bahwa implementasi aplikasi digital memerlukan kerja sama lintas sektor agar sistem dapat berjalan secara terintegrasi. Pembagian tugas yang jelas juga membantu tiap-tiap unsur dalam memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung operasional aplikasi Tumbas.

Gambar 3. SOP Aplikasi Tumbas



Sumber : Didapat Dari Disperindag

Selain itu, keberadaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) menjadi dasar penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Struktur birokrasi yang terorganisasi memungkinkan proses koordinasi berjalan lebih sistematis, terutama dalam pengelolaan data, pemeliharaan sistem aplikasi, dan pelayanan kepada pengguna. Meskipun demikian, pelaksanaan birokrasi dalam kebijakan digital tetap memerlukan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan struktur birokrasi yang lebih adaptif, implementasi aplikasi Tumbas dapat mendukung terciptanya pelayanan publik digital yang jauh lebih baik dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto.

Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa implementasi aplikasi TUMBAS melibatkan berbagai aktor pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi UMKM. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama birokrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan pada struktur birokrasi berlandaskan teori George C. Edwards III yang berfokus pada mekanisme koordinasi antarinstansi, pembagian tugas pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan dalam mendukung implementasi aplikasi Tumbas. Dengan demikian, struktur birokrasi yang terorganisir dan koordinatif menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pengembangan ekosistem digital UMKM di Kabupaten Mojokerto.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian terkait implementasi Aplikasi Tumbas sebagai strategi digital yang inovatif dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mojokerto, yang mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yakni kesuksesan kebijakan sangat ditentukan oleh mekanisme komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan UMKM dan hambatan komunikasi di awal peluncuran, pemerintah daerah secara bertahap mampu memperbaiki pendekatan implementasi melalui pelatihan, dukungan teknis, serta pembagian tugas yang lebih terstruktur. Aplikasi Tumbas terbukti tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan pemasaran di masa pandemi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam transformasi pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Secara komprehensif, Aplikasi Tumbas telah membentuk ekosistem digital yang mendorong peningkatan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Upaya ini mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap perkembangan zaman dan perubahan perilaku masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan bagian dari visi strategis untuk mencapai manajemen pemerintahan yang inovatif dan partisipatif. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi aplikasi ini hendaknya menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan pelayanan publik dengan penguatan ekonomi lokal berbasis teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segenap berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penelitian berjudul 'Implementasi Aplikasi Tumbas sebagai Ekosistem Digital dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mojokerto dapat dirampungkan secara baik. Dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, khususnya kepada Kepala Dinas dan Ibu Iis Fitrianiingsih selaku pejabat fungsional analisis perdagangan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini dan seluruh informan lainnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, teman-teman, dan segenap pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sudah memberikan doa dan dukungan, oleh karena itu saya dapat menuntaskan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- [1] R. Yayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping," *J. Ilm. Magister Ilmu Adm.*, No. 2, Pp. 56–65, 2017, [Online]. Available: [Http://Eprints.Uny.Ac.Id/17523/1/SkripsiFull.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/17523/1/SkripsiFull.Pdf)
- [2] A. Halim, "Pengaruhpertumbuhanusahamikro,Kecildan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *J. Ilm. Ekon. Pembang.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 157–158, 2020.
- [3] A. D. Handayani, "Digitalisasi Umkm: Peningkatan Kapasitas Melalui Program Literasi Digital," *J. Signal*, Vol. 11, No. 1, P. 104, 2023, Doi: 10.33603/Signal.V11i1.8213.
- [4] S. D. Ha Posangi, F Lengkong, "Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow," *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, Vol. 19, No. 11, Pp. 1649–1654, 2020.
- [5] M. R. Diniarsa And R. L. Batu, "Evaluasi Penerapan Kebijakan Diversitas Dan Inklusi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. Akunt.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 1439–1456, 2023, Doi: 10.31955/Mea.V7i2.2852.
- [6] A. Riswandi, "Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Puskesmas," *Gunahumas J. Kehumasan*, Vol. 3, No. 1, Pp. 71–91, 2020.
- [7] M. Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Application In The Transmigration And Manpower Sistem Data Di Masa Globalisasi Dikala Ini Tumbuh Sangat Pesat Dengan Teknologi Komputer Yang Terus Menjadi Mutahir Dalam Waktu Yang Relatif," *J. Ilm. Wahana Bhakti Praja*, Vol. 1, No. 1, Pp. 146–161, 2021.
- [8] A. R. Susanto, M. Masrur, M. S. Wafa, P. Studi, S. Informasi, And U. P. Tinggi, "Penerapan Framework Pieces Untuk Analisis Kinerja Aplikasi Tumbas," Vol. 12, No. 1, 2025.
- [9] M. R. Putra *Et Al.*, "Penerapan Aplikasi E-Market Program Penjualan Dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Grafik Penjualan Per Bulan Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin," 2017.
- [10] I. Akbhari And A. Prathama, "Inovasi Aplikasi E-Peken : Optimalisasi Potensi Umkm Kota Surabaya," *Neorespublica J. Ilmu Pemerintah.*, Vol. 4, No. 2, Pp. 396–409, 2023.
- [11] T. K. Ahsyar, S. Syaifullah, And A. Ardiansyah, "E-Marketplace Media Pengembangan Promosi Usaha Mikro

- Kecil Dan Menengah Dinas Koperasi Umkm Kota Pekanbaru,” *J. Ilm. Rekayasa Dan Manaj. Sist. Inf.*, Vol. 6, No. 1, P. 43, 2020, Doi: 10.24014/Rmsi.V6i1.8768.
- [12] R. Frinando And K. Artaye, “Pengembangan Aplikasi Marketplace Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Berbasis Android,” *J. Din. Inform.*, Vol. 13, No. 2, Pp. 63–68, 2021, Doi: 10.35315/Informatika.V13i2.8832.
- [13] F. Rizkya And T. R. Rinayuhani, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi Umkm Melalui Aplikasi Tumbas Di Desa Simongagrok,” Pp. 4498–4507, 2025.
- [14] Juliarso, Ahmad. "Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 10.1. 2019. 10-15.
- [15] Sudrajat, Yayat, And Indra Kristian. "Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3.2. 2022. 116-127.
- [16] Wahyuzan, Amyra Putri, Et Al. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern: Kajian Literatur Di Kota Medan." *Journal Of Accounting, Finance, Taxation, And Auditing (Jafta)* 5.2. 2023.
- [17] Sauda, Siti, And Eka Puji Agustini. "Implementasi Prototype Model Dalam Pengembangan Aplikasi Smart Cleaning Sebagai Pendukung Aplikasi Smart City." *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer* 20.1. 2020. 73-84.
- [18] Ramadhani, Rizka, Et Al. "Inovasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember." *Interelasi Humaniora* 1.2. 2024. 62-79.
- [19] Oktriastra, Karina. "Strategi Pengembangan Dan Implementasi Smart City Pemerintah Kota Pontianak." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1.5 (2020): 332232.
- [20] Maharani, Adellia, And Adie Dwiyanto Nurlukman. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang." *Sebatik* 27.1. 2023. 333-343.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.